

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE***  
**(Studi pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)**

***THE EFFECT OF PROFITABILITY AND GOOD CORPORATE GOVERNANCE TO TAX AVOIDANCE***  
***(Study Case on Coal Mining Sub-Sector Companies Listed in Indonesia Stock Exchange in 2014-2018)***

Annisa Fanie Larasati<sup>1</sup>, Sri Rahayu, S.E., M.AK., AK., CA<sup>2</sup>, Kurnia S.A.B., M.M<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

<sup>1</sup>a.fanie96@gmail.com, <sup>2</sup>srirahayu@telkomuniversity.ac.id, <sup>3</sup>akkurnia@telkomuniversity.ac.id

**ABSTRAK**

*Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang, untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada. Namun, tindakan *tax avoidance* meskipun legal, tetapi hal ini tetap merugikan pemerintah karena pemerintah tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan subsektor batubara di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Alat ukur yang digunakan pada *tax avoidance* yaitu ETR (*Effective Tax Rate*). Teknik *purposive sampling* di gunakan untuk pengambilan sampel, sehingga memperoleh 45 data sampel dan periode penelitian selama 5 tahun. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci :** ROA, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, *Tax Avoidance*

**ABSTRACT**

*Tax avoidance* is an effort to ease the tax burden by not violating the law, to minimize the tax burden legally by utilizing the existing taxation loopholes. However, *tax avoidance* is legal, but it still harms the government because the government cannot optimize tax revenue.

This study aims to determine the effect of profitability, institutional ownership, managerial ownership and independent board of commissioners on *tax avoidance* in the coal subsector mining companies on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The measuring instrument used in *tax avoidance* is ETR (*Effective Tax Rate*). The *purposive sampling* technique was used for sampling, so as to obtain 45 sample data and a study period of 5 years. Analysis of the data used is panel data regression analysis.

The results of this study indicate that profitability, institutional ownership, managerial ownership and the independent board of commissioners simultaneously influence *tax avoidance*. Partially, profitability has a negative effect on *tax avoidance*, while managerial leadership has a positive effect on *tax avoidance* and institutional ownership and the independent board of commissioners has no effect on *tax avoidance*.

**Keywords:** Return On Assets, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Size of Board Independent Commissioner

## 1. Pendahuluan

Pajak Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, pajak menjadi fokus utama dalam penerimaan negara hal itu terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kurang lebih 80% berasal dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain, antara lain penerimaan bukan pajak dan hibah.

Pemerintah selalu mengharapkan pendapatan yang besar dari sektor perpajakan, namun hal ini bertolak belakang dengan kebijakan perusahaan yang ingin membayar beban pajak seminimal mungkin. Pada umumnya beban pajak itu merupakan ancaman bagi perusahaan yang dapat menghambat perusahaan dalam mendapatkan laba yang maksimal. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak disebut perencanaan pajak (*tax avoidance*).

Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assesment system*, yaitu wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya secara sendiri. Menurut<sup>[6]</sup> *tax avoidance* sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dan bertujuan untuk menghindari pajak *Tax avoidance* dalam penelitian ini di proksikan dengan menggunakan rasio *effective tax rates* (ETR). ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang di bayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang di peroleh perusahaan

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya *return on assets*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen.. *Tax avoidance* di *proxy* dengan ETR yang di harapkan dapat mengidentifikasi keagresifitasan perencanaan pajak suatu perusahaan. Penelitian terkait variabel tersebut sudah banyak di lakukan oleh peneliti terdahulu namun hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya hasil yang berbeda.

## 2. Dasar Teori dan Metodologi Penelitian

### 2.1 Dasar Teori

#### 2.1.1 Pengertian Pajak

Iuran kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat di tunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

#### 2.1.2 Tax Avoidance

*Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang<sup>[4]</sup>. *Tax avoidance* upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang<sup>[8]</sup>.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang di lakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik di lakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax Avoidance* diukur dengan menggunakan proksi ETR sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \quad (1)$$

### 2.1.3 Return On Assets (ROA)

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang di gunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit dari aktivitas penjualannya<sup>[6]</sup>. Menurut<sup>[4]</sup> membedakan rasio profitabilitas ini menjadi dua jenis, yaitu rasio tingkat pengembalian atas investasi dan rasio kinerja operasi. Tujuan operasional dari sebagian perusahaan adalah untuk memaksimalkan profitabilitas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan definisi dari berbagai sumber di atas dapat di ketahui bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan dapat di gunakan oleh perusahaan dalam menilai tingkat pengembalian investasi dan penjualan berdasarkan dari jumlah laba yang diperoleh perusahaan.

Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Jika Perusahaan dengan pendapatan yang tinggi akan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar akan semakin tinggi juga. Apabila ETR perusahaan meningkat, maka hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak yang di lakukan perusahaan mengalami penurunan. Jadi, semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin menekan tindakan tax avoidance karena perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung melakukan tindakan tax avoidance. Hal ini di dukung oleh penelitian (Intan & Jati, 2019)<sup>[5]</sup>.

$$ROA = \frac{\text{Income}}{\text{Assets}} \times 100\%$$

### 2.1.4 Good Corporate Governance

Menurut<sup>[3]</sup> *good corporate governance* merupakan sebuah proses dan struktur yang di terapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP- 117/M-MBU/2002, *good corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang di gunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa *good corporate governance* adalah seperangkat mekanisme administratif yang mengatur hubungan antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan stakeholder-stakeholder lainnya untuk menentukan tujuan, pencapaian dan penilaian kinerja perusahaan.

### 2.1.5 Kepemilikan Institusional

Menurut penelitian Shleifer dan Vishney 1986 dalam (Arianandini, 2018)<sup>[1]</sup> menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga *non*-pemerintah seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*. Kepemilikan institusional berdampak penting dalam pengawasan *good corporate governance* di suatu perusahaan, karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang di ambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan Mahulae (2016)<sup>[7]</sup>.

$$KI = \frac{\text{jumlah kepemilikan institusi}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

### 2.1.6 Kepemilikan Manajerial

Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam penelitian (Fadhila, 2017)<sup>[2]</sup> menyatakan bahwa kepemilikan saham manajemen adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang di ambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan manajerial dapat di rumuskan, sebagai berikut :

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang di miliki dari pihak manajemen yang secara

aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris). Dengan adanya kepemilikan manajerial tentunya dengan adanya kepemilikan manajerial tentu manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Intan & Jati, 2019)<sup>[5]</sup>.

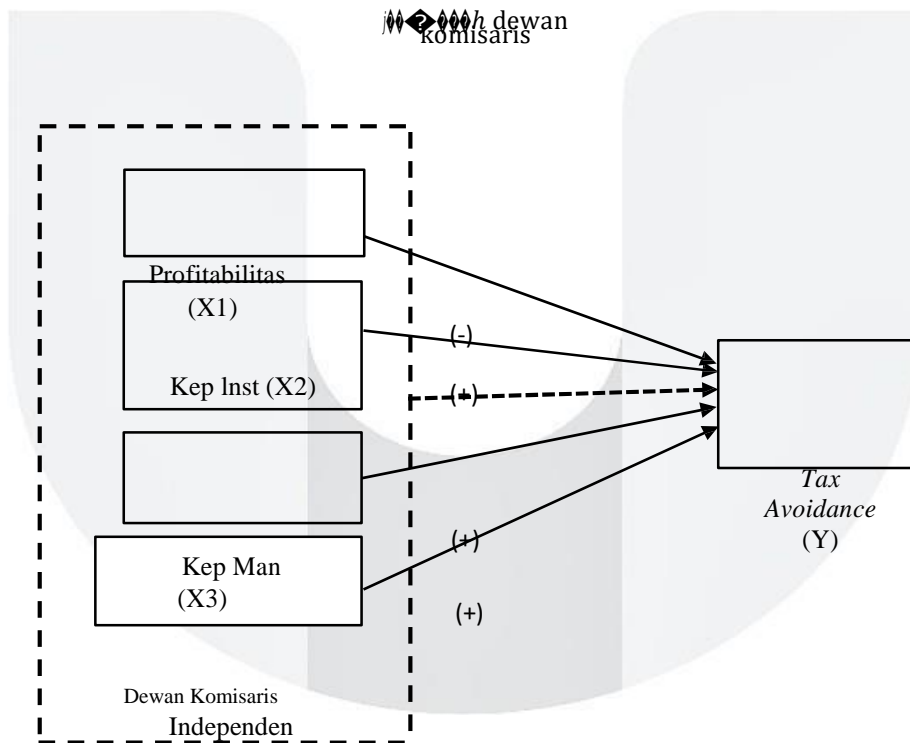
$$KM = \frac{\text{jumlah kepemilikan manajerial}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\% \quad (4)$$

**2.1.7 Dewan Komisaris Independen**

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dPalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Keberadaan dewan komisaris independen sangat di perlukan untuk membantu dewan komisaris melakukan pengawasan pada suatu perusahaan.

Dewan Komisaris Independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang di keluarkan oleh BEI. Dengan adanya dewan komisaris independen di dalam perusahaan di harapkan akan mengambil keputusan yang bijak. Dapat di katakan bahwa dengan adanya pengendalian dari komisaris independen yang baik maka akan mengurangi tindakan tax avoidance. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Fadhila (2017)<sup>[2]</sup>.

$$PDKI = \frac{\text{jumlah dewan komisaris indp}}{\text{jumlah dewan komisaris}} \times 100\% \quad (4)$$



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

: Pengaruh Parsial

: Pengaruh Simultan

## 2.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2018. Dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu perusahaan pertambangan subsektor batubara yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2014-2018, tidak memiliki ETR negatif. sehingga jumlah unit sampel yang diobservasi adalah 45 total sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Tax Avoidance
$\alpha$	= Konstanta
$X_1$	= Profitabilitas
$X_2$	= Kepemilikan Instusional
$X_3$	= Kepemilikan Manajerial
$X_4$	= Dewan Komisaris Independen
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
e	= Error term

## 3. Pembahasan

### 3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan menjelaskan deskripsi data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif dari variabel dependen, yaitu *tax avoidance*, dan variabel independen yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen.

**Tabel 1**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	Profitabilitas	KI	KM	PDKI	ETR
<b>Mean</b>	0.131596	0.689230	0.044283	0.378175	0.286569
<b>Median</b>	0.126514	0.701878	0.000949	0.333333	0.261448
<b>Maximum</b>	0.394118	0.983816	0.656705	0.666667	0.575298
<b>Minimum</b>	0.004056	6.17E-09	0.000000	0.200000	0.005431
<b>Std. Dev.</b>	0.077977	0.256142	0.106661	0.105683	0.017321
<b>Observations</b>	45	45	45	45	45

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Pada Tabel 1 dapat di lihat bahwa hasil uji statistik deskriptif terdiri dari mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Hasil pengujian statistik deskriptif menggambarkan atau menjelaskan variabel secara individual tanpa adanya keterkaitan antara variabel dependen dan independen.

Berdasarkan pada tabel uji statistik deskriptif di atas dapat dilihat bahwa variabel *tax avoidance* yang di ukur menggunakan ETR memiliki nilai mean sebesar 0,286569. Nilai rata-rata tersebut lebih besar di bandingkan standar deviasi sebesar 0.17321. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel *tax avoidance* bersifat berkelompok.

Pada variabel *return on assets* memiliki nilai mean 0.131596. Nilai rata-rata tersebut lebih besar di bandingkan dengan standar deviasi sebesar 0.077977. Hal ini menunjukkan bahwa data return on assets tahun 2014-2018 mengelompok.

Pada variabel kepemilikan institusional memiliki nilai mean 0.689230. Nilai rata-rata tersebut lebih besar di bandingkan dengan standar deviasi sebesar 0.256142. Hal ini menunjukkan bahwa data kepemilikan institusional tahun 2014-2018 mengelompok.

Pada variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai mean 0.044283. Nilai rata-rata tersebut lebih kecil di bandingkan dengan standar deviasi sebesar 0.106661. Hal ini menunjukkan bahwa data kepemilikan manajerial tahun 2014-2018 bervariasi.

Pada variabel dewan komisaris independen memiliki nilai mean 0.378175. Nilai rata-rata tersebut lebih besar di bandingkan dengan standar deviasi sebesar 0.105683. Hal ini menunjukkan bahwa data kepemilikan manajerial tahun 2014-2018 mengelompok.

### 3.2 Analisis Regresi Data Panel

Dalam pengujian model penelitian analisis data panel, dalam penelitian ini telah dilakukan uji estimasi mulai dari Uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *LM*. Hasilnya penelitian ini menggunakan *model random effect* dalam melakukan analisis data panel.

**Tabel 2**

**Hasil Estimasi Model Menggunakan *Random Effect***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.258894	0.085137	3.040902	0.0041
ROA	-0.400172	0.192524	-2.078556	0.0441
KI	0.024256	0.074545	0.325388	0.7466
KM	0.313987	0.139300	2.254036	0.0297
PDKI	0.131776	0.172708	0.763000	0.4499

Effects Specification			
Weighted Statistics			
R-squared	0.302804	Mean dependent var	0.117277
Adjusted R-squared	0.233085	S.D. dependent var	0.084189
S.E. of regression	0.073728	Sum squared resid	0.217431
F-statistic	4.343177	Durbin-Watson stat	1.988150
Prob(F-statistic)	0.005196		

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *Eviews 10*, 2019

#### 1) Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018

Koefisien regresi pada profitabilitas sebesar -0.400712 yang di miliki nilai negatif yang menunjukkan bahwa adanya hubungan dua arah antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Sehingga apabila nilai profitabilitas mengalami peningkatan akan menurunnya nilai *tax avoidance* sebesar 0.400712 dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian banyak nya perusahaan pertambangan subsektor batubara yang memiliki nilai ROA cenderung tinggi memiliki arti bahwa lebih banyak perusahaan pertambangan subsektor batubara yang memiliki tingkat laba yang tinggi.

Jika semakin tinggi ROA maka penghindaran pajak akan semakin tinggi. Tingginya nilai profitabilitas dapat menggambarkan sebagaimana efisiensi yang di lakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba maka semakin tinggi biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara. Yang mengindikasikan adanya upaya dalam melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Dari itu profitabilitas berpengaruh sejalan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

#### 2) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018

Koefisien regresi pada kepemilikan institusional sebesar 0,024256 yang memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*, sehingga jika nilai kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0 atau konstan maka akan meningkat tindakan *tax avoidance* sebesar 0,118398. Semakin tinggi nilai persentase kepemilikan institusional maka pengawasan akan lebih ketat dan akan semakin banyak yang mengawasi kinerja manajemen, karena itu akan memberikan pengawasan yang baik untuk pelaporan perpajakan

sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.

### 3) Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.

Koefisien regresi pada kepemilikan manajerial sebesar 0,313987 yang memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara kepemilikan manajerial dengan *tax avoidance*, sehingga jika nilai kepemilikan institusional mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0 atau konstan maka akan naiknya tindakan *tax avoidance* sebesar 0,313987.

Dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial memiliki pengaruh dengan arah yang positif terhadap *tax avoidance*, artinya dengan tingginya tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi pula pengawasan yang dilakukan terhadap pihak manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perusahaan dan berdampak pada nilai ETR yang tinggi, perusahaan tersebut di indikasikan tidak melakukan *tax avoidance*.

### 4) Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018.

Koefisien regresi pada dewan komisaris independen sebesar 0,131776 yang memiliki nilai positif yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*, sehingga jika nilai dewan komisaris independen mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 0 atau konstan maka akan naiknya tindakan *tax avoidance* sebesar 0,131776.

Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dan keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam memenuhi peraturan BEI.

## 4. Kesimpulan

1. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yaitu variabel profitabilitas, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *tax avoidance* memiliki nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, berarti bahwa data perusahaan tersebut cenderung mengelompok. Pada variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai *mean* lebih kecil dari standar deviasi, berarti data kepemilikan manajerial pada data penelitian ini cenderung bervariasi.
2. Kesimpulan berdasarkan hasil uji F (simultan) yaitu profitabilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan subsektor batubara 2014-2018.
3. Kesimpulan berdasarkan hasil uji T (parsial) yaitu profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan subsektor batubara 2014-2018. Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan subsektor batubara 2014-2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arianandini, P. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.3. Maret (2018): 2088-2116 ISSN: 2302-8556, 2088-2116.*
- [2] Fadhila, N. S. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.3. Desember (2017) ISSN: 2302-8556, 1803-1920.*
- [3] Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance : Tinjauan etika dalam praktik bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Jakarta.
- [4] Hery. (2015). *Analisis Kinerja Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- [5] Intan, I. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.27.3.Juni (2019): 2293-2321 ISSN: 2302-8556, 24.*
- [6] Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Jurnal Buletin Studi*

- Ekonomi*, ISSN 2580-5312 , 1-84.
- [7] Mahulae, E. E., Pratomo, B., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Tax Aoidance (Studi Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *e-Proceeding of Management: Vol. 3 No.2 Agustus 2016*, ISSN: 2355-9357, 1626-1633.
- [8] Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- [9] Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (edisi revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Pramudito, B. W., & Sari, M. R. (2015). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2303-1018, 705-722.





